

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Bahaya laten korupsi, tlah membuat hidup rakyat sengsara

Keadilan harus ditegakkan

Ganyang semua koruptor di bumi nusantara

Demi generasi, agar terus hidup maju berdikari

Demi bangsa ini, punya harga diri, punya tanggung jawab

Punya martabat, punya cita-cita

Eksistensi bangsa, gunakan, tetap terpelihara

(Lirik lagu Kita Perangi Korupsi karya Marjinal)

Sepenggal lirik tersebut adalah salah satu bentuk respon berupa kritik sosial atas bangsa Indonesia, salah satu cerminan atas keadaan Indonesia yang semakin terlihat sukar jika dilihat menggunakan mata telanjang. Lirik tersebut adalah hasil karya grup musik punk Marjinal atas kasus di Indonesia yang mengacu pada permasalahan KPK vs Polri dan sangat marak diperbincangkan pada awal tahun 2015. Kasus

yang mewabah di masyarakat ini berawal dari kasus pencalonan Budi Gunawan sebagai Ketua Kapolri pada tahun 2015 yang mencuat menjadi suatu kontroversi dan diterangi merupakan menjadi salah satu kasus lanjutan dari Cicak vs Buaya jilid 3.

Bersumber dari Majalah Gatra Edisi 29 Januari – 4 Februari 2015, beberapa rekapan kronologi mengenai kasus ini berawal dari 9 Januari 2015 saat Presiden Indonesia Jokowi mengajukan Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk maju menjadi calon tunggal Kapolri 2015. Sontak, publik gempar karena Jokowi menggunakan hak prerogatif presiden yakni hak istimewa yang dimiliki oleh presiden kepada seseorang atau kelompok. Budi Gunawan dicalonkan tunggal sebagai Ketua Kapolri untuk menggantikan Komjen Sutarmen. Dugaan menguat bahwa pilihan tersebut dibuat atas desakan Partai PDI-P dan ketua umumnya Megawati Sukarnoputri (Gatra Edisi 29 Januari – 4 Februari 2015). Ada persoalan yang lebih besar sebenarnya, Budi Gunawan memiliki catatan “merah” dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait rekening “gendutnya”. Pada 13 Januari 2015,

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) secara resmi menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi berdasarkan pernyataan Abraham Samad selaku Ketua KPK yang telah melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi mencurigakan di rekening BG (Budi Gunawan). Dengan gaji resmi sebesar Rp 7.000.000, BG diduga menerima miliaran rupiah di rekeningnya pada periode yang cukup lama.

Permasalahan semakin menjadi luas saat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad menjadi sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen. Dikutip dari www.bbc.com, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol. Ronny Sompi mengatakan bahwa penetapan tersangka atas Samad merupakan hasil pengembangan kasus pemalsuan dokumen dengan tersangka awal seorang perempuan bernama Feriyani Lim. Tak hanya itu, dikutip dari www.nasional.tempo.co bahwa AS (Abraham Samad) telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan administrasi kependudukan dengan terlapor Feriyani Lim," ujar Kepala Bidang

Humas Polda Sulawesi Selatan dan Barat Komisaris Besar Endi Sutendi. Seluruh permasalahan ini sampai sekarang tak memiliki akhir yang cukup jelas dalam penegakan hukum, menjadikan masyarakat semakin prihatin dengan sistem hukum dan kebijakan di Indonesia.

Jika berbicara mengenai korupsi, secara “absolute” korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku dan atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi/keluarga/kelompok/golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang, tidak serasi, dan tidak selaras, dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu duniawi yang berlebihan sehingga merugikan keuangan atau kekayaan negara atau kepentingan masyarakat & negara, baik secara langsung maupun tidak langsung (Soewartono, 1998 : 11). Korupsi tak semata-mata hanya terjadi antara

KPK vs Polri, rupanya kasus korupsi telah menjadi hal yang terlihat biasa di Indonesia. Pada masa Orde Lama, korupsi bahkan sudah dikenal pada masa tersebut. Pasca kemerdekaan Indonesia, korupsi telah mengguncang sejumlah partai politik. Dikutip dari www.nasional.kompas.com sejarawan Bonnie Triyana menceritakan skandal korupsi menimpa politisi senior PNI, Iskaq Tjokrohadisurjo, yang adalah mantan Menteri Perekonomian di Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kasus tersebut bergulir 14 April 1958. Kejaksaan Agung yang memeriksa Iskaq memperoleh bukti cukup untuk menyeretnya ke pengadilan terkait kepemilikan devisa di luar negeri berupa uang, tiket pesawat terbang, kereta, dan mobil tanpa seizin Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN). Iskaq akhirnya mendapat grasi dari Presiden Soekarno. Namun, mobil Mercedes Benz 300 yang diimpornya dari Eropa tetap disita untuk negara.

Tak hanya itu, partai besar lain, yakni Masyumi juga terseret korupsi. Pada 28 Maret 1957, politisi Masyumi, Jusuf Wibisono, ditahan tentara di Hotel Talagasari, Jalan Setiabudi, Bandung karena diduga terlibat korupsi. Bonnie Triyana mengutip

harian Suluh Indonesia, 20 April 1957, menceritakan, Hotel Talagasari dipenuhi tersangka korupsi. Terdapat lima mantan menteri, anggota konstituante, anggota parlemen, kepala jawatan, komisaris polisi, jaksa, pengusaha, dan lain-lain. Yang diperiksa mencapai 60 orang. Periode 1950-1965 tersebut memang dipenuhi gonjang-ganjing korupsi dan pemberontakan. Deskripsi tentang kehidupan penguasa dan politisi korup pada zaman itu bisa dibaca jelas dalam novel Senja di Jakarta karya wartawan senior Mochtar Lubis. Pada masa Orde Baru yakni saat kepemimpinan Soeharto dilakukan sejumlah upaya melawan korupsi. Soeharto pada 2 Desember 1967 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 228-1967 dan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1960 membentuk Tim Pemberantasan Korupsi dengan Ketua Jaksa Agung Sugih Arto. Tim ini bertugas membantu pemerintah memberantas korupsi dengan tindakan preventif dan represif. Berselang empat tahun, dibentuk Komisi Empat dengan Keppres Nomor 12 tanggal 31 Januari 1970 dengan anggota Wilopo, SH (ketua merangkap anggota), IJ Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, Prof Ir Johannes, dan Mayjen Sutopo Yuwono. Selanjutnya

ada Komite Anti Korupsi pada tahun 1970 yang menghimpun aktivis angkatan 1966 guna memberikan dukungan moril kepada pemerintah dan tokoh-tokoh nasional untuk memberantas korupsi yang semakin merajalela. Pada tahun 1977 dibentuk Operasi Tertib (Opstib) dalam Inpres Nomor 9 Tahun 1977 dengan koordinator Menpan dan pelaksana operasional Pangkoptamtib (Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Langkah terakhir Orde Baru memberantas korupsi adalah Tim Pemberantasan Korupsi tahun 1982.

Bersumber dari www.nasional.kompas.com, Hendri F Isnaeni, Redaktur Majalah Historia¹ menilai, lima lembaga anti korupsi Orde Baru jauh dari

¹ HISTORIA (www.historia.id) adalah majalah sejarah online pertama di Indonesia yang disajikan secara populer. Memadukan disiplin kerja jurnalistik dengan penelitian sejarah yang ketat untuk menghadirkan kisah masa lalu secara memikat dan mengesankan di hadapan pembaca. HISTORIA berdiri sebagai PT. MEDIAHISTORIA INDONESIA yang telah menerbitkan edisi cetak Majalah Historia dan Majalah Historia Online, menyajikan kisah sejarah secara populer, dilengkapi dengan foto berkualitas dan desain yang menawan. Media ini berkantor di Jalan Margaguna Ray Jakarta Selatan, Indonesia.

maksimal. "Seolah-olah ada perhatian pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Kenyataannya, tim itu hanya bekerja untuk memberikan masukan kepada penguasa soal pemberantasan korupsi. Salah satunya Tim Empat yang dipimpin mantan Perdana Menteri Wilopo. Kalau ada kasus yang harus diselidiki, tidak pernah ditindaklanjuti," kata Hendri. Lembaga-lembaga tersebut tidak berwenang menindak. Tidak pula dibangun sinergi dan pembenahan lembaga permanen seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Hendri mengatakan bahwa korupsi yang tumbuh subur semasa Orde Baru, membuktikan pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif.

Gambar 1.1 Kasus Korupsi

Anas Purbaningrum



sumber: <http://acch.kpk.go.id>

diakses 20 Februari 2016 pukul 21.38 WIB

Selain itu, kasus korupsi yang juga sempat mencuat adalah gratifikasi terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dalam persidangan pada awal 2014, Anas terbukti menerima hadiah dari berbagai proyek pemerintah serta melakukan pencucian uang dengan membeli rumah di Jakarta dan sepetak lahan di Yogyakarta senilai Rp 20,8 miliar. Anas juga disebut menyamarkan asetnya berupa tambang di Kutai Timur, Kalimantan Timur.



sumber: <http://acch.kpk.go.id>

diakses 20 Februari 2016 pukul 23.22 WIB

Selain kasus Anas Purbaningrum, ada pula kasus korupsi atas pencucian uang dalam pengadaan simulator SIM R2 dan R4 yang dilakukan oleh Irjen Pol Djoko Susilo di Korlantas Mabes Polri tahun anggaran 2011. KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tersebut telah melanggar Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Menurut sumber www.kpk.go.id, juru Bicara KPK Johan Budi SP menuturkan, mantan Kakorlantas itu diduga menyamarkan, menyembunyikan, membelanjakan, menempatkan, atau mengubah bentuk uang hasil korupsi simulator SIM menjadi berupa bentuk barang yang lain.

Dari serangkaian korupsi yang telah dipaparkan, saat permasalahan KPK vs Polri menimbulkan respon dan kritik di masyarakat dengan munculnya gerakan dengan tagar atau hashtag #saveKPK yang semakin massif dan menjadi *trending topic* lalu meluas ke sejumlah daerah dan media sosial. #SaveKPK sempat menjadi peringkat teratas *Trending*

Topic Worldwide (TTWW) pada 23 Januari 2015 pukul 13:45 WIB. Oleh kutipan yang berasal dari www.tekno.kompas, gerakan hashtag ini mulai masuk dalam 10 besar kata yang paling dikicaukan pengguna Twitter sedunia pada sekitar 11.30 WIB.



Gambar 1.3

Trending Topic Worldwide #saveKPK

Sumber: www.tribunnews.com

diakses pada 07 November 2015 pukul 13.13 WIB

Selain respon masyarakat yang bermunculan melalui media sosial, terdapat juga respon yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Salah satunya adalah respon dari grup musik punk Marjinal

yang mengadakan konser bertajuk “Jum’at Keramat” di kompleks KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) pada tanggal 20 Februari 2015. Marjinal adalah salah satu band punk kawakan asal Jakarta yang telah berdiri pada tahun 1997 dengan anggota yakni Mike (Vocal & gitar), Bob (bass). Pada konser “Jum’at Keramat” di kompleks gedung KPK, Marjinal membawakan dua lagu yakni “Hukum Rimba” dan “Kita Perangi Korupsi” yang mereka ciptakan dalam rangka merespon gerakan #saveKPK sekaligus mengkritisi kondisi hukum sekaligus polemik korupsi yang saat itu melanda Indonesia. Di negara berkembang, kritik sering dilihat sebagai sesuatu yang tidak loyal (*disloyalty*), padahal di masyarakat yang maju, kritik justru merupakan sesuatu yang penting, sebagai masukan agar sistem politik menjadi lebih baik (Sobur, 2001: 194).

Jika berkata mengenai teori, menurut Deddy Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi (2010) mengatakan bahwa fungsi kedua dari komunikasi merupakan komunikasi ekspresif. Yang dimaksud dengan komunikasi ekspresif ialah tidak bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, namun dapat

dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita yang terdiri dari perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah, dan benci dapat disampaikan melalui kata-kata salah satunya adalah musik (Mulyana, 2010; 24). Contohnya seperti protes mahasiswa terhadap kebijakan penguasa atau negara dengan melakukan demonstrasi, unjuk rasa, dan aksi diam. Emosi kita juga dapat disalurkan melalui bentuk-bentuk seni seperti puisi, novel, tarian, lukisan, dan salah satunya adalah musik, dengan musiklah manusia dapat mengekspresikan perasaan, kesadaran, dan bahkan pandangan hidup (ideologi) mereka (Mulyana, 2001: 25).

Musik merupakan suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu kesatuan (Jamalus, 1988: 1). Di dalam musik, berisi rangkaian kata-kata yang menjadi sebuah lirik. Sebuah lagu, di dalamnya terdapat lirik yang merupakan sebuah alat penyambung ide antara penulis

kepada penikmat lagu tersebut, dan lirik adalah sebuah produk dari bahasa yang menjadi induk dari semua penulisan. McQuail mengatakan bahwa komunikasi massa adalah suatu proses masyarakat yang menjadikan media sebagai penghubung sosial (Liliweri, 1991: 67). Dalam hal ini media massa, termasuk musik melalui lirik-liriknya menyajikan sebuah simbol mengenai berbagai realitas sosial di masyarakat. Realitas sosial inilah yang menjadi pesan dalam proses komunikasi massa.

Berbagai gerakan revolusi di dunia, banyak dimotori oleh gerakan kesenian. Di Indonesia sendiri, gerakan perlawanan terhadap rezim banyak dihasiai oleh gerakan kesenian. Banyak para sastrawan dan seniman yang menampilkan acara-acara kesenian dengan semangat pemberontakan terhadap kediktatoran dan keangkuhan kekuasaan. Pentas kesenian rakyat baik itu berupa pembacaan sajak, pementasan teater dan konser musik menjadi ujung tombak dalam gerakan perubahan dan revolusi di hadapan kekuasaan. WS Rendra misalnya, lewat pembacaan sajak-sajaknya yang didalamnya sarat dengan nada-nada protes terhadap kekuasaan rezim

orde lama maupun orde baru. Pada tahun 1960-an, dikenal juga Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) Partai Komunis Indonesia dibawah pimpinan Pramoedya Ananta Toer yang bergerak dalam kritik sosial melalui seni. Seniman Lekra berpendapat bahwa keberpihakan yang tegas terhadap rakyat dan mengabdikan pada kepentingan rakyat adalah satu-satunya jalan bagi seniman, sarjana-sarjana, maupun pekerja-pekerja kebudayaan untuk mencapai hasil yang tahan uji dan tahan waktu (Darmono, 2000: 655). Seniman Lekra akan menampilkan karya-karya yang menunjukkan hubungan timbal balik antara kemiskinan, korupsi, dan kekuasaan. (Damono, 2000: 655).

Selain melalui puisi, perlawanan terhadap kebijakan otoritas yang dianggap merugikan masyarakat bawah serta kaum minor juga diekspresikan melalui musik. Dalam konteks musik, penggunaan musik sebagai sarana penyampaian kritik marak digunakan oleh musisi di negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris mulai tahun 1960-an. Kutipan dari www.lspr.edu menyatakan bahwa musik tidak hanya dianggap sebagai bentuk hiburan, namun juga sebagai saluran untuk mengekspresikan pesan

atau opini, bahkan sebuah lagu dapat menyampaikan beragam pesan, mulai dari pesan cinta hingga pesan protes akan suatu hal. Salah satu momen bersejarah musik sebagai bentuk dari kritik adalah terjadi pada bulan Agustus tahun 1969 di Bethel, New York ketika sekitar 400,000 orang Amerika membuktikan bahwa musik bisa mewartakan suatu hal yang dapat menggerakkan masyarakat. *Woodstock Music and Art Fair* atau yang dikenal sampai sekarang dengan Festival Musik Woodstock menjadi ajang kaum Hippie dan kaum muda lainnya yang peduli akan masalah politik dan sosial pada saat itu untuk berkumpul bersama-sama untuk mengkampanyekan perdamaian dan menolak secara tegas pengiriman tentara Amerika ke Vietnam (Susilo; 2009: 15). Festival yang disebut sebagai *3 Days of Peace & Music* ini bermula dari pikiran kritis akan keadaan sosial pada saat itu dimana perang Vietnam masih menjadi pusat perhatian dunia dan *Civil Rights Revolution* yang mengambil tema kesetaraan hak perempuan dan orang kulit hitam masih menjadi topik utama

Selain itu, ada pula lagu milik John Lennon berjudul “*Imagine*” yang berisikan tentang ajakan untuk hidup dengan damai dan menentang keras peperangan. Sebelum lagu tersebut beredar dipasaran secara luas pada tahun 1971, Lennon dikenal sangat aktif turun kejalan untuk memprotes kebijaksanaan perang Vietnam yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebagai salah satu bentuk protesnya kepada pemerintahan Inggris yang juga terlibat dalam pertempuran, Lennon mengembalikan medali penghargaan MBE (*Member of British Empire*) yang pernah diberikan Ratu Elizabeth pada tanggal 25 November 1969 di Istana Buckingham, London (www.beatlesbible.com). Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu bentuk ketidakpuasannya atas keikutsertaan Inggris dalam perang di Nigeria.

Kemudian pada rentang tahun yang tidak jauh berbeda, legenda hidup Bob Dylan yang juga sangat gencar memprotes kebijakan perang Vietnam. Sejumlah karya terbaik Dylan begitu populer ketika dirinya menjadi dokumentarian dan tokoh pergolakan di Amerika Serikat. Karya-karya Dylan dianggap mampu menjadi kontrol sosial bagi perilaku

pemerintah yang bertindak berlebihan. Pada tahun 2012 Dylan bahkan menerima penghargaan tertinggi bernama *Presidential Medal of Freedom* (www.rollingstone.co.id) yang diberikan langsung oleh Presiden Barack Obama. Penghargaan tersebut diberikan setiap tahunnya kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi bagi keamanan dan kepentingan nasional Amerika, perdamaian dunia atau usaha di bidang budaya dan seni. Selain bentuk perlawanan terhadap sejumlah kebijakan politik, musik juga tercatat sebagai medium perjuangan, hal ini dapat dilihat dari sejumlah karya-karya Bob Marley yang dalam berbagai lagunya menggambarkan berbagai perjuangan kaum Afrika yang tertindas oleh kaum kulit putih.

Mengulas mengenai kritik bahwa seperti pada umumnya kritik merupakan sebuah mekanisme yang bermanfaat untuk menjalankan sebuah kontrol. Sasaran dari kritik pun bermacam-macam, bisa ditujukan untuk kekuasaan, bahkan untuk rakyat sendiri. Kritik dalam kehadirannya selalu dilekati oleh sifat sifat politik dan karena bisa dimengerti bila kritik dekat dengan kata kekuasaan (Mas'oed; 1997: x).

Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi dalam berkritik, maka dari sanalah bahasa mampu tampil sebagai sebuah instrument penyalur. Kata kritik sendiri secara harafiah dapat diperoleh dari kamus Bahasa Indonesia adalah kecaman atau tanggapan yang sering disertai oleh argumentasi baik maupun buruk tentang sebuah karya, pendapat, situasi, maupun tindakan seseorang atau kelompok (Mas'ood, 1997: 4). Kritik sosial dan politik adalah salah satu ciri khas budaya perlawanan (*counter culture*) yang dimana kritik tersebut menentang sistem logika formal dan norma-norma sosial (www.acicis.edu.au). Perlu dijelaskan bahwa budaya perlawanan atau *counter culture* merupakan salah satu budaya yang bereaksi atas adanya budaya dominan (*dominant culture*) yang bermunculan di masyarakat (Hasan, 2011: 29).

Gerakan *counter culture* pada tahun 1960-an di AS memang memiliki kekhasan tersendiri yang pada masa itu laki-laki dilarang berambut panjang. Siswa berambut gondrong akan diusir dari sekolah, bahkan dianggap sebagai kriminal oleh polisi. Itulah sebabnya, Bob Weir, remaja berambut gondrong, memilih kabur dari sekolah dan keluarganya untuk

bergabung menjadi gitaris Grateful Dead.² Pada masa itu, kalangan orang tua serta negara masih terpaku pada nilai-nilai pasca-Perang Dunia II yang harus tertanam di kalangan remaja. Kalangan tua merasa paling tahu, kejayaan Amerika adalah teladan bagi seluruh dunia, yang sebaiknya diikuti. Lebih-lebih kepercayaan itu diperkuat dengan perasaan tidak aman, dari menyeruaknya ideologi komunisme di belahan dunia yang lain. Maka, dengan merasa benar, pemerintahan mengirim anak-anak muda untuk berperang di Vietnam. Pada saat yang sama, anak-anak muda melihat sebuah idealisasi baru yang tersimpul dalam counter culture. Mereka mencita-citakan masyarakat yang damai, toleran, dan bebas dari tekanan politik. Pada titik itulah, mereka melihat

² The Grateful Dead adalah band yang paling penting dari era psychedelic dan di antara tindakan yang paling inovatif di sejarah musik Rock n Roll. Mereka melakukan gerakan perlawanan secara perlahan melalui lagu-lagu mereka. Band ini dikenal karena gaya yang unik dan eklektik, menggabungkan berbagai unsur musik rock, folk, bluegrass, blues, rock, psychedelic rock, dan space rock (<https://rockhall.com/inductees/the-grateful-dead/bio/> diakses pada 21 Februari 2016 pukul 12.07 WIB)

bahwa kebudayaan secara keseluruhan merupakan sistem represi. Menurut mereka, kebahagiaan telah direnggut oleh masyarakat dengan segala sistemnya (Susilo, 2009: 18).

Marjinal merupakan band yang mengadopsi budaya punk, dimana punk adalah salah satu irisan dalam kontrakultur (Susilo, 2009: 53). Perkembangan dari punk sebenarnya bermula pada tahun 1960an dengan tanda kemunculan sejumlah band rock amatir yang disebut dengan *garage band*. Istilah *garage* merujuk pada kebiasaan mereka yang mengadakan latihan, rekaman, maupun gigs (konser) di garasi-garasi rumah, contohnya adalah band The Barbarians, Magic Mushroom, The Seeds, The Standells, dan Hollywood Argyls. Pada pertengahan tahun 1970-an, beberapa band seperti Ramones, Television, Talking Heads muncul dan banyak dipengaruhi oleh proto-punk yang memainkan musik rock n roll secara lebih keras dan lebih agresif. Cara proto-punk bermain musik merupakan salah satu respon terhadap komersialisasi kontra-kulture yang dilakukan oleh kaum hippies, salah satu pelopor proto-punk adalah band MC5 dan The Stooges (Susilo: 2009: 54). Atribut

yang digunakan pun beragam yakni jaket kulit hitam, kacamata gelap, dan jins sehingga mendekati gaya berbusana geng jalanan.

Pada tahun 1975, Richard Hell and The Voidoids merilis sebuah lagu “Blank Generation” beraliran punk rock. Dari sanalah cikal bakal gerakan punk kemudian disebut pula dengan “Blank Generation” yang merupakan istilah merujuk pada nihilism absolut seperti yang diabadikan dalam slogan punk yakni “*No Future*” (Susilo; 2009: 54). Dua tahun kemudian, istilah ini meneruskan paham atau kepercayaan seperti Lost Generation dan Beat Generation yang digaungkan oleh band yakni Sex Pistols dalam lagu “*Pretty Vacant*”. Sex Pistols merupakan salah satu ikon yang utama dalam gempita dunia punk, kebesaran namanya yang mulai naik daun pada tahun 1975 mendorong munculnya semangat punk nan luar biasa pada akhir 1976 dengan munculnya berbagai band punk seperti The Clash, Siouxsia and The Banshees, The Adverts, Generation X, dan The Slits. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 1978, punk mengalami kehilangan momentumnya yakni pada saat kritikus musik Julie Burchill dan Tony Parsons dalam buku

The Boy Locked at Johnny: The Obituary of Rock n' Roll menyatakan surutnya gerakan punk dan mencemooh para eksponennya sebagai orang-orang yang buruk. Akan tetapi punk sebenarnya tak benar-benar hilang, beberapa eksponen utamanya justru bersikap konsisten dengan gerakan ini contohnya Johnny Rotten yang menolak hadir dalam upacara penghargaan dan pengabdian namanya di Rock N' Roll Hall of Fame. Dia juga tetap bersuara keras dan menunjukkan bahwa punk bukan sekadar genre musik, melainkan pilihan sikap hidup (Susilo; 2009: 57).

Berbicara mengenai kritik sosial dalam musik, di Indonesia pergerakan ini sudah tak lagi asing. Gerakan ini juga dilakukan oleh Iwan Fals yang kala itu terkenal dengan liriknya di Masa Orde Baru. Iwan Fals memiliki identik karya musik yang berbau kritik politik dan kebudayaan, Iwan Fals adalah momok bagi Orde Baru kala itu. Perbedaan Iwan Fals dan Marjinal terletak pada proses berkarya mereka, Iwan Fals memang memiliki lirik yang sarat dengan kritik, begitu juga dengan Marjinal. Namun Iwan Fals berada pada naungan label mainstream *major label* yakni

Musica Studio yang juga melahirkan beberapa musisi seperti Peterpan, Chrisye, dan d'Masive.

“The four Major labels are: Warner Music Group, EMI, Sony Music, and Universal Music Group. Major labels often seek artists that have a large and thriving fan base, or a new act that they believe could be very successful. With a major label deal comes a long list of contacts that take care of a number of things for you. A major label will take care of your marketing, publishing, distribution, sales, advertising, legal, shipping and merchandising. (Journal Music Box Artist Consulting Musician & Artist Consulting Services from Vancouver: Canada; 2013).

Empat major labels terbesar saat ini adalah Warner Music Group, EMI, Sony Music, dan Universal Group. Major label atau yang biasa disebut label besar sering mencari seniman yang memiliki

basis penggemar besar dan berkembang, atau tindakan mereka yang dipercaya disinyalir dapat meraih kesuksesan. Dengan memilih majors label maka beberapa hal seperti kontrak dan segala macam pengurusan karya akan ditanggung oleh perusahaan. Majors label akan mengurus pemasaran, penerbitan, distribusi, penjualan, periklanan, hukum, pengiriman, dan merchandising.

“Because they offer these services they often take a larger cut of the profits however they are usually willing to give you a larger sum of money to record your album. Negotiating a deal with a major label is often quite complicated because of the many services offered so be sure to seek professional advice before you sign your name to a record deal. With the help of your team, a major label can skyrocket your success and get your music heard all over the world” ((Journal

Music Box Artist Consulting
 Musician & Artist Consulting
 Services from Vancouver: Canada;
 2013).

Karena majors label menawarkan layanan tersebut, maka majors label sering mengambil potongan yang lebih besar dari keuntungan, namun mereka pada umumnya bersedia memberikan pinjaman uang yang cukup besar untuk mendanai rekaman album. Negosiasi kesepakatan dengan majors label sering kali cukup rumit karena banyaknya layanan yang ditawarkan. Dengan majors label, seorang musisi atau seniman yang berkarya akan mendapatkan bantuan tim dengan muda untuk meroketkan keberhasilan musisi agar dapat didengarkan di seluruh dunia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat perbedaan dari Iwan Fals dan Marjinal yang terletak pada pemilihan labels yakni Iwan Fals yang berada dibawah naungan majors labels dengan segala macam fasilitas yang didapatkannya dari labels record, sedangkan Marjinal berada pada *indie label* yaitu Sapi

Betina Records yang dibuat secara mandiri oleh Marjinal Band dan sangatlah berbeda jauh dari majors label. Penjelasan perbedaan tersebut didapatkan oleh peneliti juga melalui wawancara dengan Wendi Putranto selaku editor Rolling Stone Indonesia Magazine dalam buku Music Records Indie Label (Rez, 2008: 26) yang menyatakan bahwa indie merupakan gerakan bermusik yang berbasis dari apa yang musisi miliki yakni menggunakan *Do It Yourself (DIY)*; etika yang dimiliki oleh musisi/seniman mulai dari proses merekam, mendistribusikan, dan mempromosikan dengan uang sendiri. Indie berasal dari kata independent yang artinya merdeka, bebas, dan mandiri (Susilo, 2009: 67). Selain itu, indie label memiliki keistimewaan yakni memiliki kekuatan dalam mengungkapkan ekspresi pada pemusiknya (Rez, 2008: 28).



Gambar 1.4

Profile grup musik Marjinal

Sumber: <https://www.facebook.com/marjinalband/>

diakses pada Sabtu, 07 November 2015 pukul 14.48

WIB

Itulah sebabnya, peneliti merasa Marjinal adalah sosok yang cocok untuk diteliti karena ideologi yang mereka miliki berbeda dengan seniman *mainstream* pada umumnya yang juga mengkritik dalam lagu namun karya mereka ditunggangi oleh tuntutan dari label mereka yakni majors label. Marjinal adalah band indie punk yang pada awalnya menggunakan nama AA (Anti Abri) dan kemudian berganti nama menjadi AM (Anti Military) ini telah

menelurkan empat album yakni album pertama bertajuk *Tunduk Diam Atau Bangkit Melawan* (1999), disusul album kedua yang dirilis setahun kemudian, *Antifasis dan Antirasis Action* (2000). Lalu, pada tahun 2003 mereka juga secara produktif menghasilkan album bertajuk *Marsinah*, diikuti *Predator* (2005), *parTAI marJINal* (2009), dan *KPK (Kita Perangi Korupsi)*, yakni yang baru di-launching 17 Februari 2015. Pada tahun 2003, Anti Military resmi berganti nama menjadi Marjinal yang terinspirasi dari nama Marsinah, salah satu buruh Surabaya yang berjuang akan Hak Asasi Manusia. Dalam pembuatan lagu-lagunya, Marjinal selalu konsisten dengan lirik yang kritis, proses pembuatan karya mereka pun memiliki ideologi tersendiri yakni DIY (*Do It Yourself*) yang banyak dilakukan oleh kawan-kawan musisi independent atau yang pada umumnya dikenal dengan musisi indie (www.sorgemaz.com).

Dikutip dari video dokumentasi Sorgemagz “Wawancara dengan Marjinal”, Mike Marjinal (vocal & gitar) menyatakan bahwa musik adalah salah satu cara menyampaikan suara menuju masyarakat.

“Dengan musik inilah kita bergerak menyampaikan apa suara masyarakat kepada semua pihak”. “Musik bisa mendobrak. Bagi kami (Marjinal) selain secara kebetulan bisa bermain musik. Kenapa nggak? Kami membawa musik sebagai sesuatu yang menjembatani, dan menyuarakan suatu persoalan untuk mencapai suatu yang diharapkan. Akhirnya kami menggunakan media musik. Contohnya pada saat Rezim Soeharto sedang panas, album pertama Marjinal muncul. Ini adalah upaya untuk menyuarakan kondisi yang terjadi pada saat itu dan menggunakan musik sebagai media,” ujar Mike dalam channel Metro TV program Kick Andy Edisi 16 Agustus 2013.

Masuk ke dalam bahasan wacana, peneliti akan menggunakan metode analisis wacana kritis dalam membedah penelitian ini. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa wacana dibentuk oleh paragraph-paragraf sedangkan paragraf dibentuk oleh kalimat-kalimat. Hemat kata, pembahasan wacana adalah pembahasan bahasa dan tuturan yang harus dalam satu rangkaian situasi atau dengan kata lain, makna suatu bahasa berada dalam rangkaian konteks dan situasi. (Darma; 2013: 1). Selain itu wacana

dikatakan sebagai rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi. Komunikasi dapat menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Apa pun bentuknya, wacana mengasumsi adanya penyapa (*addressor*) dan pesapa (*addressee*). Dalam wacana lisan, penyapa adalah pembicara sedangkan pesapa adalah pendengar (Darma; 2013: 2).

Sedangkan wacana kritis pada dasarnya merupakan sebuah upaya atau proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Dalam arti sederhana bahwa sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan oleh karena itu analisis yang terbentuk nantinya disadari telah dipengaruhi oleh si penulis dari berbagai faktor. Selain itu, perlu disadari pula bahwa di balik wacana tersebut terdapat makna dari citra yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan (Darma; 2013: 49). Analisis wacana kritis lebih banyak mengkaji mengenai upaya kekuatan sosial, pelecehan, dominasi, dan ketimpangan yang direproduksi dan

dipertahankan melalui teks yang pembahasannya dihubungkan dengan konteks sosial dan politik analisis wacana kritis mungkin dilakukan dengan cara berbeda, tetap sama semua variasi prosedur mempunyai beberapa tujuan dan asumsi. (Darma; 2013: 50). Selain itu, analisis wacana kritis juga digunakan untuk mendiskripsikan sesuatu, menerjemahkan, menganalisis, dan mengkritik kehidupan sosial yang tercermin dalam teks dan ucapan, dan analisis wacana kritis diasosiasikan, dipertahankan, dikembangkan, dan ditranformasikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan konteks sejarah yang spesifik (Darma; 2013: 53). Dijelaskan pula bahwa analisis wacana kritis ditegaskan sebagai kelompok gagasan atas motif berpikir yang bisa dikenali dalam teks dan komunikasi verbal dan juga bisa ditemui dalam struktur sosial yang lebih luas. (Darma; 2013: 50).

Lagu dapat diteliti menggunakan analisis wacana karena berdasarkan wujud dan jenis wacana dapat ditinjau dari sudut realitas, media komunikasi, cara pemaparan, dan jenis pemakaian. Dalam kenyataannya, wujud dari bentuk wacana itu dapat dilihat dalam beragam buah karya si pembuat wacana

yakni *text* (wacana dalam wujud tulisan/grafis) antara lain dalam wujud berita, features, artikel, opini, cerpen, novel, dsb. *Talk* (wacana dalam bentuk ucapan), antara lain adalah rekaman wawancara, obrolan, pidato, dsb. *Act* (wacana dalam wujud tindakan) antara lain dalam wujud lakon drama, tarian, film, defile, dan demonstrasi, dsb. *Artifact* (wacana dalam wujud jejak) antara lain adalah bentuk bangunan, lanskap, fashion, puing, dsb. Secara tidak langsung, musik adalah salah satu wujud yang diucapkan secara lisan berupa ucapan (Darma; 2013: 4). Menurut Sunandar (2008; 24) bahwa komunikasi lisan adalah komunikasi dalam bentuk percakapan atau tertulis. Setiap orang dalam suatu komunitas secara verbal dalam menyampaikan pesan atau informasi. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata untuk menyatakan ide dan gaya dalam berkomunikasi disesuaikan dengan situasi dan lawan komunikasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membedah menggunakan pendekatan analisis wacana kritis milik Fairclough. Pendekatan ini didasarkan pada pertanyaan besar yakni bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro.

Fairclough memusatkan perhatian wacana pada bahasa, dan menggunakan wacana yang menunjuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, lebih daripada aktivitas individu atau merefleksikan sesuatu (Darma; 2013: 89). Menurut Fairclough, bahasa merupakan praktik sosial mengandung implikasi, yakni yang pertama adalah wacana merupakan bentuk dari tindakan, seseorang menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan bagi dunia dan khususnya sebagai bentuk representasi ketika melihat dunia realita. Kedua, model ini mengimplikasikan adanya hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial, dalam arti wacana terbagi oleh struktur sosial, kelas, dan relasi sosial lain yang dihubungkan dengan relasi spesifik (Fairclough, 1992: 63-64).

Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana wacana di dalam lirik lagu yakni “Hukum Rimba” dan “Kita Perangi Korupsi” yang merupakan salah satu bentuk respon kritik sosial yang diciptakan oleh grup musik punk Marjinal. Punk yang dimata masyarakat dipandang sebelah mata karena memiliki stereotipe sebagai salah satu kelompok yang negatif, brutal, dan anarki disini rupanya membuat sebuah kritik sosial

atas Indonesia melalui lagu. Diharapkan dengan menggunakan analisis wacana kritis milik Norman Fairclough yang membedah tak hanya teks saja, namun hingga pembuat teks, dan konteks sosial yang beredar kala itu. Sehingga penelitian ini sangat cocok menggunakan Norman Fairclough yang membedah wacana melalui teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Sehingga peneliti dapat mengetahui wacana apa yang dibangun oleh Marjinal melalui lagu “Hukum Rimba” dan “Kita Perangi Korupsi”.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana wacana kritik sosial korupsi di dalam dalam lirik lagu “Hukum Rimba” dan “Kita Perangi Korupsi” karya Grup Musik Marjinal Band?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui wacana kritik sosial di dalam lagu “Hukum Rimba” dan “Kita Perangi Korupsi” karya Grup Musik Marjinal Band.

I.4 Batasan Masalah

Batasan dari penelitian ini adalah membahas mengenai bentuk wacana kritik sosial korupsi di dalam dalam lagu “Hukum Rimba” dan “Kita Perangi Korupsi” karya Grup Musik Marjinal Band.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berkaitan dengan Ilmu Komunikasi secara umum dibidang media massa maupun secara khusus dalam ilmu analisis wacana kritis. Serta menjadi refrensi literature akademis mengenai analisis wacana kritis dalam kritik sosial di dalam sebuah lirik lagu.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi bagi masyarakat agar dapat menerima hasil penelitian ini mengenai analisis wacana kritis mengenai kritik sosial yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat melalui media sebuah lagu, tak hanya media teks dan

elektronik, dan pada nantinya secara berkelanjutan masyarakat menjadi lebih kritis mengenai keadaan bangsanya. Kemudian agar menjadi manfaat yang berguna sebagai literatur maupun refrensi bagi peneliti yang mendatang dengan tema serupa.